

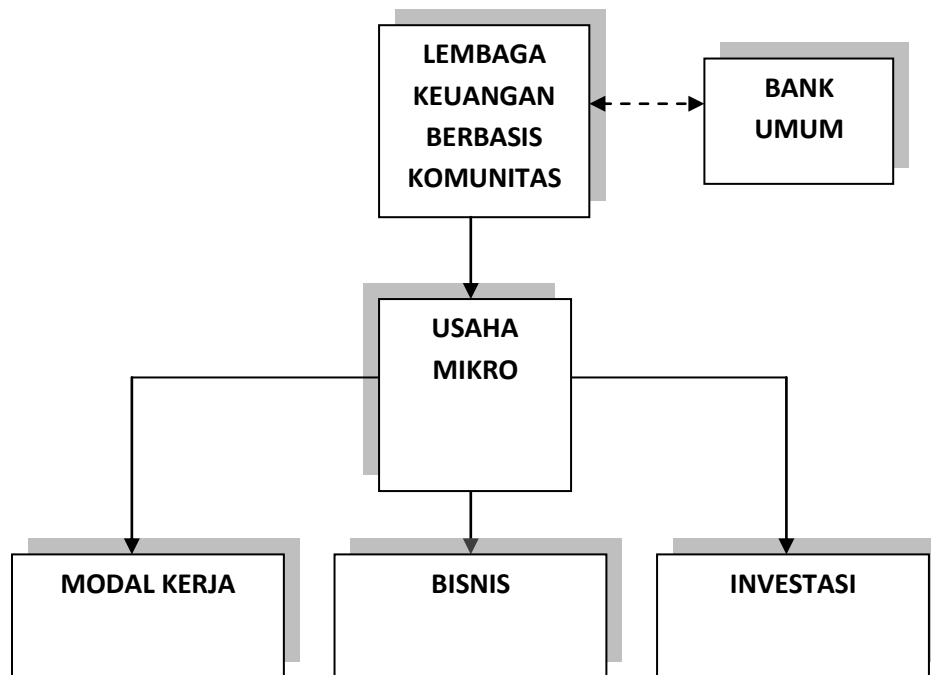
## **LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS KOMUNITAS**

### **Profil kelembagaan keuangan berbasis komunitas**

Indonesia telah memiliki ragam model pembiayaan termasuk pembiayaan pada usaha mikro. Ragam dan model pembiayaan meliputi jenis produk pembiayaan mikro maupun lembaga pelaksanaannya kepada masyarakat. Desakan pentingnya pengembangan ini akan semakin terasa setelah krisis perbankan melanda Indonesia, sehingga perbankan lumpuh dan tidak dapat menjadi lembaga yang efektif lagi.

Lembaga perkreditan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni *Pertama*, BPR yang beroperasi sampai ke pelosok desa; dan kelompok yang *Kedua* adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Masih ada LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti Bank BRI, yayasan, LSM, serta lembaga-lembaga keagamaan termasuk juga lembaga keuangan yang ilegal. Sedangkan lembaga keuangan berbasis komunitas memiliki jangkauan di kota besar yang melayani dana pembiayaan pada usaha mikro yang sangat dekat dengan koleteral kelompok sebagai tanggung jawab pada lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Lembaga Keuangan berbasis komunitas terlihat dari aset usaha mikro kurang dari Rp 25 juta, menjalankan usaha pemenuhan kebutuhan primer, cash flow harian, omset dikurang dari Rp 100. Juta/tahun dan sangat dekat dengan lingkungan keluarga, besar pinjaman yang pernah diterima usaha mikro serta di kenal dekat dengan lingkungan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini sebagai pelayanan dana pinjaman untuk usaha mikro di kota besar.



**Gambar 1 : Alur dana pinjaman lembaga keuangan berbasis komunitas**

**Keterangan :**

1. Kordinasi      ← - - - - - →
2. Aliran dana pinjaman      —————

Pada gambar 1. dapat diperlihatkan pada bagian atas adalah sumber dana atau modal yang dapat diakses oleh usaha mikro dan sekaligus lembaga yang menanganinya. Dari gambar tersebut secara fungsional memang terlihat bahwa masing-masing lembaga keuangan berbasis komunitas mempunyai segmen-segmen pasar tersendiri. Pada garis ke kanan menggambarkan, bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan investasi atau penggunaan modal untuk proses nilai tambah. Di bagian lain kelompok pengguna dana dan nasabah potensial yang dapat dilayani oleh masing-masing Lembaga Keuangan. Gambar hasil penelitian ini memberikan penjelasan secara rinci segmen besaran pinjaman dan usaha mikro sasaran yang dapat dijadikan nasabah, sehingga setiap pengembang program dana pinjaman mampu membawa program dan dukungan Lembaga keuangan berbasisi komunitas yang diperlukan sesuai dengan kelembagaan. Sasaran

potensi adalah cara penerima dana pinjaman yang mampu diidentifikasi dalam kelompok sehingga secara mudah mampu mengenali kelompok mana yang jauh dari pelayanan pinjaman dapat dikelompokkan pada potensi nasabah.

Lembaga Keuangan berbasis komunitas :

1. Tumbuh dan berkembang melayani usaha mikro;
2. Mandiri dan bebas di masyarakat;
3. Sangat dekat dengan masyarakat lingkungan sekitarnya
4. Memiliki prosedur peminjaman dana tanpa agunan;
5. Pendanaan untuk usaha produktif masyarakat sekitar LKM tersebut ;
6. Lembaga ini memiliki pasar masyarakat tersendiri.
7. Lembaga ini melihat aktivitas usahanya
8. Berpotensi sangat setia dalam pengembalian dana pinjaman
9. Besar tawaran pengembalian dana pinjaman menjadi acuan

Faktor empiris tingkat pengembalian dana pinjaman baik, mutu pelayanan lebih penting dan mengenal orang dan memahami nasabah serta cash flow sebagai pengganti kollateral fisik. Pendekatan kelompok juga terbukti efektif sebagai pressure group dan mengurangi biaya dan risiko dalam penyaluran dana pinjaman. Keunggulan di atas menyebabkan Lembaga Keuangan berbasis Komunitas sangat penting dalam pengembangan usaha mikro sebagai sumber pembiayaan yang mudah diakses usaha mikro. Lembaga keuangan berbasis komunitas dengan jangkauan usaha mikro sebagai nasabah akhir-akhir ini tumbuh pesat saat ini, sehingga dibutuhkan pengawasan efektif dari Bank Indonesia.

**Potensi Pengembangan Lembaga Keuangan berbasis komunitas**

Pola Grameen Bank adalah bentuk dan model pembiayaan dana yang diakui keberhasilannya oleh dunia, yang dirancang untuk perkreditan bagi keluarga miskin. Modal ini terbukti telah berhasil membangkitkan kegiatan ekonomi bagi kelompok penduduk miskin di Bangladesh, sehingga dianggap sesuai sebagai penyediaan dana bagi penciptaan kegiatan produktif untuk penduduk miskin. Grameen Bank diakui adalah sistem perbankan sosial yang terbaik dan paling berhasil, sehingga model tersebut tepat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kelompok penduduk miskin.

BRI di Indonesia diakui sebagai The Biggest and The Best Micro Banking System in the world, maka Grameen Bank adalah The Best Social Banking System. Bank BRI terletak perbedaannya pada kemampuan mobilisasi dana masyarakat dan kegiatan usaha komersial usaha mikro. Sementara Grameen Bank terletak pada kemampuannya untuk menjangkau masyarakat miskin menjadi produktif dan siap masuk dalam arus kegiatan ekonomi biasa serta diarahkan memanfaatkan mekanisme perbankan di masa datang. Di Indonesia koperasi menjadi kekuatan efektif untuk pembiayaan anggota koperasi baik para petani, peternak, produsen, maupun konsumen sebagai bagian pengembangan lembaga keuangan yang terus menerus perlu dikembangkan secara optimal. Potensi pengembangan Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas masih harus optimal dengan perhatian :

1. Usaha mikro belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh Lembaga Keuangan yang ada
2. Lembaga Keuangan berbasis Komunitas berada di tengah masyarakat
3. Potensi usaha mikro dari masyarakat tinggi di daerah terutama di pedesaan
4. Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas memiliki pasar tersendiri

Sebagai perbandingan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan berbasis komunitas bahwa permintaan kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro masih sangat luas dan segmennya bermacam-macam untuk keberhasilan kelembagaan keuangan ini. Hal ini mengingat sebagian besar kelompok usaha mikro belum dapat dilayani oleh bank. Kelompok peminjam tersebut

meliputi usaha produktif masyarakat yang memiliki perputaran usaha tinggi dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

**Tabel 1 Peta Lembaga Keuangan Mikro**

Jenis LKM	Total	Peminjam (Ribuan orang)	Peminjaman (Juta rupiah)	Rata-rata Pinjaman (Rp. Ribu)	Jumlah Deposit (Rp. Juta)	LDR
BRI Unit	3.694	2.518	6.141.400	2.439	17.477.868	0,36
BPR Non BKD	2.427	1.889	3.066.078	1.623	2.621.709	1,89
Badan Kredit Desa	5.345	726	147.648	203	24.003	6,15
KSP	1.097	655	530.814	810	166.625	3,19
USP	35.218	10.141	3.629.053	359	1.156.804	3,14
Lembaga Dana Kredit Pedesaan	2.272	1.326	358.000	270	334.000	1,07
Lembaga Pengadaian	685	10.000	793.000	793	---	---

**Sumber: Bank Indonesia 2001 dan Sumantoro Martowijoyo**

Di Lihat dari besarnya kredit dan distribusi dana yang disalurkan maka dua kekuatan besar penyelenggara kredit mikro adalah BRI-unit dan koperasi (KSP dan USP) yang masing-masing menyumbang sebesar 46 % dan 31 % terhadap total kredit mikro. Ditinjau dari jangkauan pelayanan memang koperasi yang paling doniman baik dari segi titik pelayanan (unit lembaga) maupun nasabah (peminjam), kemudian BRI menempati urutan kedua dalam jumlah nasabah dan BKD dalam titik pelayanan. Jika diamati lebih lanjut segmen kredit mikro papan atas memang sebagian terbesar ditangani BRI meskipun rata-rata peminjamnya hanya Rp. 2.439.000 jauh dibawah batas maksimum Rp. 50 Juta. Sementara BPR masih merupakan lembaga yang meminjamkan dananya dibawah BRI. Koperasi dan perkreditan lain nampaknya

benar-benar melayani lapisan paling bawah dari pelaku kegiatan produktif karena secara rata-rata menanganikan peminjam dibawah Rp. 1 Juta. Di Lihat dari kemampuan memobilisasi dana masyarakat hampir semua Lembaga Keuangan tersebut masih lemah, kecuali BRI dengan ditunjukkan LDR di atas 1. BRI unit yang berhasil memobilisasi tabungan mencapai Rp. 17 triliun lebih hanya meminjamkan sekitar Rp. 6,1 triliun. Data ini menunjukkan potensi besar mengembangkan Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas di Kota besar. Lembaga Keuangan ini berkonsentrasi di kota-kota besar di Indonesia untuk melayani penyediaan dana pinjaman bagi usaha mikro.

### **Pengaturan Lembaga Keuangan berbasis Komunitas**

Lembaga Keuangan berbasis Komunitas diharapkan tidak membuka kantor cabang di luar wilayah kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga lembaga ini mampu sebagai *community bank* yang diharapkan "memperdalam " akses pelayanan kepada masyarakat di sekitarnya. Kurang difahaminya konsep Lembaga Keuangan berbasis komunitas oleh pihak pengawas Bank Indonesia. Lembaga ini masih berorientasi kepada perbankan umum sehingga perbedaan persepsi di lapangan mengenai hal-hal yang justru merupakan pelaksanaan misi Lembaga Keuangan berbasis Komunitas kabur, seperti pemberian kredit dalam jumlah kecil-kecil dan pemberian kredit tanpa agunan. Untuk itu perlu diperhatikan

1. **Peraturan yang ada**, pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawasan bank berdasarkan peraturan yang berlaku tidak untuk bank umum dengan menyesuaikan beberapa rasio dan cara pengawasan dengan risiko yang khusus dihadapi Lembaga Keuangan berbasis Komunitas perlu segera diterbitkan dalam peraturan formal (tidak ambivalen seperti kasus Status BKD yang masih "menggantung"(berstatus BPR tapi belum BPR). Berdasarkan UU Perbankan No. 7/1992, BKD memperoleh status sebagai BPR, tetapi tidak/belum memenuhi beberapa persyaratan/kewajiban sebagai BPR, yaitu: (i) membuka kantor setiap hari kerja (persyaratan pengukuhan LDKP menjadi BPR, SKB Depdagri-BI-Depkeu 26 September 1994), (ii) ketentuan pemenuhan modal minimum, (iii) ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPR, (iv) kewajiban pelaporan bulanan kepada BI.

2. **Pendekatan Mandiri**, di mana ditunjuk pihak ke tiga untuk mengawasi Lembaga Keuangan berbasis Komunitas berdasarkan persetujuan antara otoritas pengawasan dengan pihak terkait. Contoh, Indonesia di mana pengawasan atas bank umum dan BPR dilakukan oleh bank sentral, sedangkan pengawasan atas BKD diserahkan kepada BRI. Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas mandiri dalam pengawasan.
3. **Pembentukan aliansi/koalisi beberapa pihak terkait**, sebagai unit pengawasan dari bank sentral, lembaga penyedia dana bagi keuangan mikro (*apex/wholesale finance intermediary*), bukan bank umum yang memberi kredit kepada Lembaga Swasdaya Masyarakat, badan pengawasan pemerintah, lembaga penelitian, akademisi, dan lembaga donor.

### **Lembaga Keuangan berbasis Komunitas dan Pembangunan Daerah**

Pengembangan lembaga keuangan ini di Indonesia harus mampu mendukung pengembangan kebijakan pembangunan sektoral perdesaan terpadu yang didesentralisasikan ke daerah. Pengembangan lembaga ini diharapkan seperti sistem kredit perdesaan. Sistem Kredit Pedesaan ini merupakan salah satu komponen program untuk mengurangi kemiskinan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat. Berdasarkan peraturan daerah masing-masing, Bank Pembangunan Daerah ditunjuk menjadi pembina teknis, sedangkan pejabat pemerintah dari tingkat propinsi sampai kecamatan bertindak sebagai badan pembina.

Keberhasilan LDKP sebagian besar tergantung kepada intensitas pembinaan dari BPD di masing-masing propinsi serta keberhasilannya dalam membebaskan diri dari campur tangan birokrasi. Tentu pula Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas dapat sebagai bagian pembinaan lembaga Keuangan binaan kerangka otonomi daerah. Dalam rangka otonomi daerah, selain merupakan penyedia pelayanan keuangan bagi masyarakat ekonomi lemah, Lembaga Keuangan berbasis Komunitas mempunyai potensi sebagai penyumbang penghasilan daerah.

### **Sumber Pustaka**

1. Berenbach, Shari dan Craig Churchill, *Regulation and Supervision of Microfinance Institutions*, The Microfinance Network Occasional Paper No.1, 1997

2. Chavez, Rodrigo A. dan Claudio Gonzales-Vega, *Principles of Regulation and Prudential Supervision: Should They Be Different for Microenterprise Finance Organizations?* , Rural Finance Program, Dept of Agricultural Economics and Rural Sociology, Columbus, Ohio, 1992
3. Martowijoyo, Sumantoro, *Dampak Kebijakan Deregulasi Perbankan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Perdesaan*, naskah disertasi, tidak diterbitkan, 1999
4. Mubyarto dan Loekman Soetrisno, *Integrated Rural Development: Indonesia*, CIRDAP, 1989
5. Rock, Rachel dan Maria Otero, eds., *From Margin to Mainstream: The Regulation and Supervision of Microfinance*, Monograph Series No.11. ACCION International, 1997
6. Martowijoyo, Sumantoro : Ketua Pusat Studi Keuangan Kecil dan Mikro (PUSAKO, mantan Pemimpin Proyek Kredit Mikro (ADB - BI)
7. Dahlan Siamat, *Lembaga Keuangan dan manajemen Bank*
8. Yunus, Muhammad (2007), *Bank Kaum Miskin; Kisah Yunus dan Grameen Bank memerangi kemiskinan*, marjin kiri, Jakarta
9. Syafi'i, Antonio(2001), *Bank Syariah; dari teori ke praktis*, Jakarta